

RESUME PENELITIAN

Agenda Setting Pemberitaan Kasus-Kasus Teroris Di Indonesia (Studi Divisi Humas Mabes Polri dan Masyarakat Jakarta-Bandung)

Ilham Prisgunanto, SS, M.Si¹

Abstrak

Apakah ada kesamaan antara agenda khalayak yang ada di masyarakat dengan agenda isu yang ada di Mabes Polri? Penelitian ini akan menguji kesamaan atau kesesuaian pendapat masyarakat dengan Mabes Polri. Dengan demikian akan diketahui apakah kerja Polri sudah dipahami dan diakui. Penelitian kuantitatif ini mengambil populasi masyarakat Jakarta - Bandung dan Humas Polri sebesar 105 responden. Dengan pembagian 80 responden masyarakat (Depok, Bandung dan Jakarta) dan 25 responden dari Mabes Polri (diwakili Divisi Humas Mabes Polri) dengan model purposive sampling. Temuan menunjukkan bahwa ada kesesuaian, kesamaan pendapat dan pandangan masyarakat Jakarta dan Bandung terhadap pemberitaan teroris yang ada di media massa (televisi, surat kabar, majalah, internet, radio dan lain-lain) dengan Polri. Dengan demikian Polri sudah berhasil menyamakan persepsi masyarakat tentang teroris. Teroris adalah pihak kejam yang harus dibasmi karena mengganggu Kamtibmas dan membahayakan Negara. Dapat dikatakan Divisi Humas Mabes Polri sudah berhasil menjalankan tugasnya sebagai agen pemencar informasi Polri ke masyarakat dalam pelaksanaan tugas ke ranah pemberitaan.

Kata Kunci

Agenda Setting, Terorisme, Pemberitaan, Agenda Khalayak, Komunikasi

1 Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran dan Pengajar Tetap Komunikasi Sosial Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian-Jakarta

A. Pendahuluan

Setiap Negara demokratis yang menegakkan supremasi hukum mutlak harus memiliki aparat. Oleh sebab itu keberadaan polisi sebagai aparat berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah perlu. Tak salah bila ada pernyataan yang mengklaim, bahwa polisi adalah pintu gerbang sistem peradilan pidana dan kunci penegakan hukum.² Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan permanen. Kehadirannya mutlak, karena berfungsi melekat erat dengan sistem Pemerintahan. Pada umumnya lembaga kepolisian memiliki tugas, fungsi dan peran yang universal sama di seluruh dunia, yaitu penanggulangan kejahatan, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyebutkan, Polri berfungsi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu Polri dianggap harus memahami tuntutan masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik. Dari kilasan sejarah diketahui, bahwa kerap polisi digunakan oleh Negara. Tak heran polisi diasosiasikan dekat dengan poros kekuasaan. Ambivalensi sikap polisi inilah yang terlihat pada masuknya kepentingan politis dalam pengarahannya. Kekuasaan rezim dan dominasi politik kerap mencoreng kerja polisi dalam perilaku berpihak pada kepentingan penguasa.³ Ketidakpuasan dan kekecewaan publik terhadap polisi lebih disebabkan pada pelayanan buruk yang didasarkan pada; faktor internal, seperti; SDM polisi minim, tidak terkontrol dan bertanggungjawab, profesional, militeristik, brutalitas, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor eksternal, seperti; perubahan lingkungan masyarakat, seperti; isu-isu global, demokratisasi HAM, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pergeseran norma dan aturan masyarakat.⁴

Lamban, kasar, dingin (tidak hangat), represif, kaku, korup, apatis, birokratif, menghindar dan hanya mengenal garis komando merupakan 'cemoohan' ke polisi. Kondisi ini terlihat dengan berkembang anekdot, bahwa 'bila hilang kambing dan melaporkan ke polisi, maka akan hilang sapi'. Rumor tersebut semakin membuat Polri terdesak dalam konstelasi profesionalitas. Klaim tidak transparan kepada publik adalah permasalahan

2 Loebby Lukman. Hak asasi manusia dalam hukum acara pidana. Jakarta: Datacom, 2002.

3 Said Saile. Fokus Utama, *Jurnal Studi Kepolisian*, edisi 064 April – Juni 2005, hal v.

4 *Loc.cit.*, 2002, hal. 11.

yang kerap diajukan dalam memahami kerja polisi. Tidak adanya keterbukaan, maka publik berusaha memahami kinerja polisi lewat tampilan-tampilan pemberitaan. Peran media massa sangat besar dalam menciptakan gambaran alam kognisi manusia. Bagaimana pers memandang polisi tidak lepas dari bagaimana kondisi masyarakat, tataran sistem pers yang berlaku di negara tersebut, *authoritarian, social responsibility theory* atau *free press*?⁵

Polri dituntut melakukan pergeseran (*degree of emphasis*) terhadap peran, fungsi dan tugasnya dengan mengedepankan konsep-konsep. Pertama; Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kedua sebagai penegak hukum, dan ketiga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini akibat ada perubahan paradigma baru, bahwa Polri kembali ke tugas pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta aparat penegak hukum yang profesional. Polri menuju polisi sipil (*civilian police*) dengan reposisi tugas dan perannya.⁶ Pergeseran-pergeseran yang terjadi ini menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek pasif, tetapi aktif yang turut andil menentukan keberhasilan dan penilaian tugas-tugas Polri.

Guna mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap struktur organisasi polisi, akan sangat mudah terlihat dari bagaimana pers merepresentasikan organisasi itu dalam tampilan pemberitaan? Karena berita adalah bentuk luaran dari adanya hubungan antara organisasi Polri dengan pers. Apakah hubungannya itu erat, renggang atau biasa saja? Pemahaman terhadap pers juga terlihat dari nuansa cakupan iklim politik, sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

B. Permasalahan dan Tujuan

Pertentangan teroris penjahat atau pahlawan menjadi sesuatu yang sangat krusial saat ini. Banyak orang percaya bahwa penanganan kasus teroris dianggap isu titipan dari negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Sistem kerja teroris diketahui banyak menggunakan saluran media massa.⁷ Oleh sebab itu permasalahan penelitian ini ingin mengetahui, bagaimana pemahaman dan konsepsi masyarakat terhadap kasus-kasus dan

5 Oliver Boyd-Barret and Chris Newbold (eds). *Approaches to media reader*. London: Arnold, 1995.

6 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. "Pelayanan Kepolisian di Bidang Penegakkan Hukum, Faktor Yang Mempengaruhi dan Strategi Peningkatannya. Seminar Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian XXXIX-B & XL-K. Jakarta: PTIK, 2004, hal 2.

7 Ilham Prisgunanto. "Terorisme dan Media Massa, *Republika*, 19 Juni 2007.

isu-isu tentang terorisme? Bagaimana Agenda Setting pemberitaan, adakah kesamaan konsepsi yang diberikan oleh pihak Polri dengan masyarakat terhadap teroris? Tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui agenda setting antara publik dengan Polri terhadap pemberitaan kasus-kasus teroris.
2. Mengetahui agenda khayalak terhadap kasus-kasus teroris dikaitkan dengan pandangan mereka terhadap citra perwajahan komunikasi organisasi Polri dikaitkan dengan perubahan menuju Polri sipil.
3. Mengetahui agenda media massa terhadap kasus-kasus teroris dihubungkan dengan pandangan mereka terhadap Polri.

D. Metode Penelitian

Penelitian agenda setting ini berupaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah. Paradigma penelitian adalah positivistik dengan menggunakan analisis data kuantitatif analitis melalui pengujian hipotesis statistikal terhadap minimal dua variabel (*bivariat*).

▪ Populasi dan Sampel

Populasi (*universal*) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diambil adalah masyarakat di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan dan anggota Polri baik anggota polisi, maupun PNS Polri. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik penarikan sampel adalah *non probability* yang bersifat *purposive sampling*. Penarikan menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan dirasa dapat menjadi sampel.

Sampel yang diambil dari anggota Polri yang kerap berhubungan dengan jurnalis, yaitu divisi Humas Mabes Polri yang jumlahnya secara *stratified random sampling* diambil pada tiap bidang di Divisi Polri Humas. Pengambilan sampel dibagi sedemikian:

- a. Staf dan personel (Polri) Divisi Humas Polri sebanyak = 25 orang.
- b. Masyarakat umum tersebar Jakarta dan Bandung sebanyak = 80 orang.

- Total jumlah responden dalam sampel ini = 105 orang.

▪ **Penyebaran Kuesioner**

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, baik perorangan, kelompok atau organisasi. Data primer penelitian ini kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis yang disebar ke responden. Model teoritik yang digunakan konseptualisasi kerangka pikir Psikologi Komunikasi model Jalaluddin Rakhmat dan desain riset agenda setting model Maxwell McComb.⁸ Dengan demikian operasional konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPERASIONALISASI KONSEPTUAL

| No. | Variabel | | Dimensi | Indikator |
|-----|--|------------|---------|--|
| | X | Y | | |
| 1. | Staf/Personil Divisi Humas Mabes Polri | Masyarakat | AFEKTIF | 1. Pemahaman Teroris. 2. Gambaran teroris 3. Punyateman teroris |
| 2. | Staf/Personil Divisi Humas Mabes Polri | Masyarakat | KONATIF | 1. Berapaka limeronton TV 2. Sukamenonton film teroris 3. Sukamembacasurat kabar |
| 3. | Staf/Personil Divisi Humas Mabes Polri | Masyarakat | TOKOH | 1. Sosok soleh atau jahat? 2. Rekaan atau benar ada 3. Islam atau bukan Islam? 4. Apakah perlu dihukum? |

⁸ Maxwell McCombs and David L. Baum. *Agenda setting: readings on media, public opinion, and policymaking*. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991.

| | | | | |
|----|--|------------|----------|---|
| 4. | Staf/Personil Divisi Humas Mabes Polri | Masyarakat | PERSEPSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kerja polisi? 2. Polisibisaatasiteroris 3. Polisi taat hukum |
| 5. | Staf/Personil Divisi Humas Mabes Polri | Masyarakat | HUBUNGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah menjadi korban. 2. Pernah ditahan 3. Ada saudara polisi |

• Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dimasukkan dalam lembar data secara langsung dan ditabulasikan menurut klasifikasi tertentu. Penelitian menggunakan rumus Spearman dengan pengujian hipotesis. Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan signifikan hipotesis asosiatif, bila masing-masing variabel berhubungan.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2-1)}$$

Keterangan : ρ = koefisien korelasi Spearman Rank **WASPADA**

Korelasi Spearman bekerja dengan data ordinal atau yang lebih tinggi. Penelitian ini jenis datanya ratio, dengan demikian temuan dapat langsung diolah tanpa harus melakukan peringkat ranking.

• Pengkodean dan Perumusan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan skala *Semantic Differensial*, seperti:
Teroris bagi anda adalah?

Penjahat 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Pahlawan

Oknum 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Aparat

Orang asing 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Orang Indonesia

Dalam perumusan hipotesis digunakan dua variabel, yakni; variabel bebas (variabel yang mempengaruhi) dan variabel terikat/bergantung (variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas).

- a) Variabel bebas (X) adalah Pendapat Staf (anggota Polri) Terhadap Teroris.
- b) Variabel terikat (Y) adalah Pendapat Khalayak Terhadap Teroris.

Hipotesis Statistikal:

- a). H_0 : Tidak terdapat hubungan antara X dan Y
- b). H_a : Terdapat hubungan antara X dan Y

▪ Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Divisi Humas Mabes Polri dan masyarakat di sekitar Jakarta dan Bandung. Daerah Bandung dilakukan di daerah Dipati Ukur Universitas Padjajaran, sedangkan di Jakarta adalah daerah Kebayoran Blok M dan kelurahan Bakti Jaya, Depok.

E. Kajian Teoritik dan Literatur

▪ Kajian Teoritik Agenda Setting Media Massa

Media massa dapat mengubah pola, sikap, karakter dan tingkah laku manusia. Orang beranggapan media massa secara signifikan menyebabkan timbulnya permasalahan seputar penyakit sosial, seperti; pornografi, kriminalitas dan kekerasan. Keandalan proses *cultivation* (penyiaran berulang-ulang suatu berita) dianggap ampuh mengubah sikap publik. Media massa mungkin tidak begitu berhasil menentukan apa yang seharusnya dipikirkan, tetapi sangat menentukan apa yang

seharusnya direnungkan.⁹ Penentuan agenda media yang menancapkan di kepala khalayak adalah masalah-masalah dan citra ke dalam pikiran publik. Media massa membangun gambaran publik terhadap figur politik dengan mempresentasikan obyek-obyek mendukung. Dengan maksud apa seharusnya individu pikirkan, diketahui dan memiliki perasaan tentang satu hal. Proses agenda media pada kenyataannya memiliki implikasi terhadap peran media massa pada tataran sosial dan transmisi budaya.

Isu media, agenda publik, kandidat politik dan atribusi mereka yang berdiri pada pondasi demokrasi. Budaya politik lebih besar didefinisikan dalam dasar-dasar agenda kewarganegaraan, kepercayaan politik dan pemilihan umum. Penggalan agenda budaya menggerakkan teori agenda setting jauh ke depan. Pencarian kultural, sejarah agenda setting didefinisikan dalam koleksi ingatan sosial pada masa lampau. Khalayak terpengaruh agenda media massa pada banyak aspek dari opini publik dan sikap yang merupakan proses atribusi mendefinisikan pendekatan fisik dan ide-ide yang ada

Menurut Charles Wright gambaran yang ada di atas kepala manusia terbentuk oleh media. Sebelumnya hal itu tidak dipercayai, media massa tidak saja memberikan informasi, tetapi menuntun pengalaman. Media massa tidak mungkin mempengaruhi pikiran orang, akan tetapi justru lebih mempengaruhi tentang apa yang harus dipikirkan orang, *what to think about*, bukan sebaliknya, "*what to think* (apa yang harus dipikirkan?) Secara teoritis ide dasar agenda setting melihat hubungan kausal antara isi media dengan persepsi publik tentang isu-isu yang dianggap penting.

Teori agenda setting muncul sebagai upaya khalayak membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial. Dalam hubungan kausalitas ini, titik berat pada sejauh mana kemampuan media mempengaruhi kognisi khalayak. *Gate keeper* media bisa menentukan bobot penyajian berita berdasarkan kebijakan media tersebut, demikianlah hasil dari penelitian Maxwell McComb. Ditambahkan menurut penelitian Winter dan Eyal ada efek kuat dari agenda setting terhadap pendapat publik tentang isu-isu hak sipil.¹⁰

9 Steven W. Littlejohn, *Human communications theories*, Belmont: Wadworth, 1999

10 McCombs, Maxwell. C (1992). "Explorers and surveyors: expending strategies for agenda-setting research" in

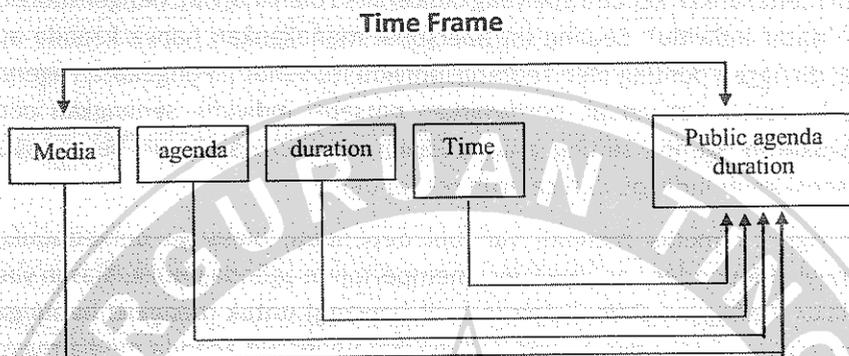
Penelitian agenda setting terpusat pada hubungan kausalitas antara isi media dengan persepsi publik. Demikianlah hasil yang dilakukan oleh Dannish, Suine dan Borre. Pendapat lain justru menunjukkan, bahwa peningkatan komunikasi antar pribadi dapat mengurangi efek agenda setting. Bahwa meningkatkan diskusi antar persona, memudahkan terjadinya efek agenda setting. Dapat dikatakan bahwa komunikasi antar persona merupakan faktor *intervening* yang dapat mengurangi pentingnya isu-isu tertentu.

Menurut Menheim, agenda media terdiri dari pokok-pokok persoalan, aktor, peristiwa, anggapan dan pandangan yang memanfaatkan waktu dan ruang dalam publikasi yang tersedia untuk disampaikan kepada publik. McComb menyebutkan bahwa pengaruh media massa terhadap persepsi publik, yakni; media massa hanya berpengaruh pada isu-isu yang bersifat "tidak dialami langsung", daripada isu-isu yang dialami langsung oleh publik. Eyal dan kawan-kawan juga mengajukan kerangka konsep waktu (*time frame*) dalam agenda setting yang menurut mereka dalam penelitian media massa diidentifikasi pada 5 tahapan berbeda:

1. Kerangka waktu, yaitu periode waktu keseluruhan yang diperhitungkan mulai dari permulaan sampai pada penyelesaian proses pengumpulan data.
2. Senjang waktu, yaitu waktu luang antara *variable independen* (agenda setting).
3. Lamanya pengukuran agenda media, yaitu jumlah waktu selama pengukuran media dilakukan.
4. Lamanya pengukuran agenda publik, yaitu jumlah waktu selama agenda publik, yaitu jumlah waktu selama pengukuran agenda publik dilakukan.

Journalism Quarterly, vol. 69/No. 4, AEJMC, University of South California, Winter, 1992.

5. Rentang efek optimal., yaitu; puncak asosiasi antara penekanan media dengan publik mengenai suatu isu.



Menurut Eyal kerangka waktu (*time frame*) disediakan dapat terjadi adalah 17 hari sampai 3 tahun. Sedangkan waktu pengukuran agenda media berkisar antara 7 sampai 4 setengah bulan. Untuk pengukuran agenda publik (*duration of the public agenda measure*) adalah waktu sehari sampai 1 bulan, khusus untuk jangka waktu efek optimal (*the optimal effect span*) berlangsung 8 minggu. Ada 3 (tiga) hal yang diuraikan De Fleur dan Dennis Everette dalam penyusunan agenda setting, yakni;

1. Proses keredaksian dan peliputan (reporting) sampai penyuntingan (editing).
2. Hasil proses tersebut berupa agenda.
3. Agenda itu mengajak khalayak berpikir mengenai kepentingan topik atau peristiwa yang ditonjolkan atau peristiwa yang.

Menurut Mc Leod konsep agenda publik dalam 3 kategori, yaitu;

1. Individual isu *saliency* atau derajat kepentingan suatu isu berdasarkan prioritas pribadi
2. *Perceived issue saliency* atau pendapat publik tentang apa yang dianggap penting orang lain.
3. *Community issue saliency*, derajat penting suatu isu dilihat dari suatu unit sosial.

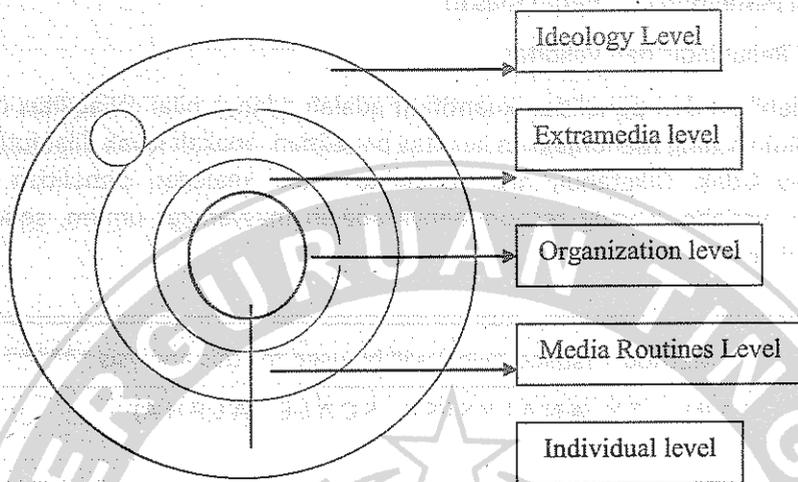
Menurut McComb ada dua pandangan tentang konsep agenda publik, yakni; perbedaaan interpersonal dan intrapersonal. Agenda interpersonal lebih menekankan kepada apa yang dibicarakan oleh individu dengan individu lain (antar individu). Sedang intrapersonal menekankan hanya kepada apa yang dianggap penting oleh seorang individu itu sendiri. Pengukuran agenda publik secara individual, berdasarkan persepsi individu, sedangkan pada pengukuran agenda setting antar individu, penonjolan topik berdasarkan persepsi antar individu dari seluruh responden.

Agenda media menjadi variabel dependen, biasanya berkedudukan sebagai independen variable kunci mempertajam agenda publik. Kiasan yang berlaku *'Pelling on Onion'* (lapisan kulit bawang) untuk mengerti hubungan antara faktor-faktor dan bermacam-macam pengaruh agenda media massa. Susunan konsentris kulit bawang mempresentasikan sejumlah gambaran yang mempertajam agenda media. Seperti kulit bawang, pengaruh lapisan luar akan berpengaruh pada lapisan dalam yang terdekat dengan inti bawang. Elaborasi tertinggi pada kiasan bawang berisi banyak lapisan, berjarak dari yang berlaku, ideologi sosial pada kepercayaan dan psikologis individualis jurnalis.¹¹

Teori kulit bawang ini disebutkan Shoemaker dan Reese sebagai tingkatan ekstramedia kunci eksternal sumber-sumber berita, seperti; para politisi, pejabat publik, praktisi yang berhubungan langsung dengan publik. Fenomena tersebut sering disebut intermedia agenda setting. Sedapat mungkin tingkat interaksi ditekan dan validasi norma sosial dan tradisional jurnalis diangkat. Nilai profesional adalah lapisan bawang yang mendekati pusat untuk mendefinisi aturan dasar. Kurang memadainya proses pemberitaan dan pemberian informasi menjadi kritik Lippman.¹²

11 Shoemaker, Pamela. J and Reese, Stephen D (1996). *Mediating the message: theories of influence on mass media content*. 2nd.ed. New York: Longman.

12 Walter Lippman (1922). *Public opinion with new introduction by Michael Curtis*. New Jersey: Transaction Publisher, 1991, diterjemahkan oleh S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999.



Berita bukan cerminan situasi dan kondisi sosial, namun seolah-olah realitas (*pseudo-environment*). Pers menyediakan pandangan dunia luar yang membantu membentuk gambaran yang dipikirkan orang. Era 1980-an telah terjadi pembalikan peran agenda media dari variabel independen menjadi dependen. Dari siapa yang menata agenda publik menjadi siapa yang menata agenda media. Dengan demikian ada perubahan fokus dari efek media ke jurnalis. Walau banyak studi yang mengkonsentrasikan atribusi khalayak, namun sedikit yang mengeksplorasi hubungan antara efek agenda setting dengan stimulus atribut.

Penonjolan isu-isu di media massa berkembang secara internasional, seperti; terorisme, inflasi, pengangguran, atau kriminal yang mempengaruhi pengalaman mereka. Faktor-faktor pengaruh media massa secara khusus, seperti; durasi, panjang, jumlah dan isi jenis informasi. Efek agenda setting akan meningkat seiring terpaan media. Kebutuhan akan orientasi merupakan satu dari dua kondisi kesatuan, dimana terdapat bukti-bukti yang jelas secara totalitas. Ada temuan yang menyebutkan bahwa ada hubungan negatif antara ketertarikan khalayak dengan efek agenda setting.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

▪ Uji Reliabilitas dan Validitas

Kelebihan dari penelitian kuantitatif adalah adanya nilai reliabilitas dan validitas yang menunjukkan kualitas penelitian, apakah layak dilanjutkan atau tidak. Diketahui, nilai reliabilitas atau keajegan penelitian ini dari variabel Y yang respondennya adalah masyarakat umum, seperti berikut:

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 80.0

N of Items = 37

Alpha = .8769

(data hasil pengolahan SPSS)

Kualitas variable Y sebesar 87,69% (0,8769), artinya hanya sebesar 12,31% responden yang menjawab tidak konstan dan ajeg dalam penelitian. Nilai kualitas penelitian memiliki ambang batas minimal di atas 0,5 ukuran memiliki nilai layak. Dengan demikian penelitian dengan variable Y dapat dilanjutkan.

Variabel X yang respondennya staf dan personel Mabes Polri memiliki nilai keajegan:

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

*** Warning *** Zero variance items

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0 N of Items = 37

Alpha = .8095

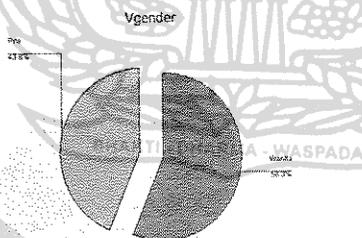
(data hasil pengolahan SPSS)

Artinya kualitas pada variabel X sebesar 80% (0,809), dengan demikian hanya sebesar 20% responden menjawab tidak konstan terhadap kuesioner yang diberikan. Nilai konstan atau ajeg-nya penelitian ini cukup tinggi, sehingga penelitian bisa dilanjutkan.

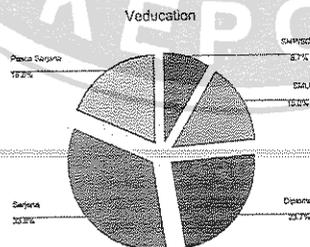
Analisis Deskriptif

Variabel Y

a. Gender

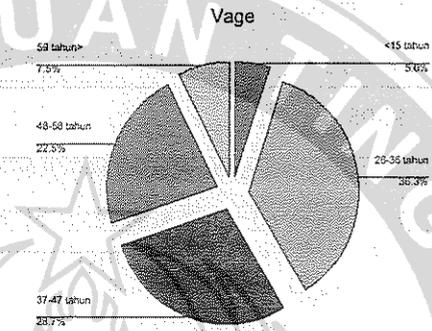


b. Pendidikan

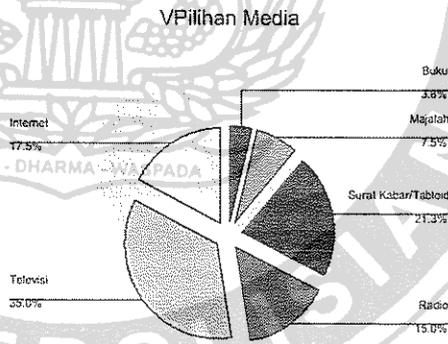


Dari aspek gender dan pendidikan terlihat responden masyarakat, paling banyak wanita (56,3%) dengan pendidikan rata-rata Sarjana (33,8%). Dapat dikatakan responden yang memiliki kadar intelektualitas tinggi dan keterlibatan emosi karena adanya keterlibatan emosi responden diharapkan memberikan penilaian jujur terhadap pemberitaan.

c. Usia

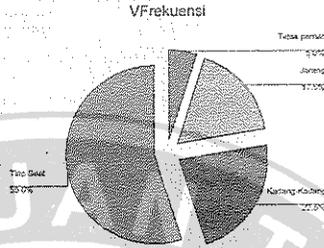


d. Pilihan Media Massa

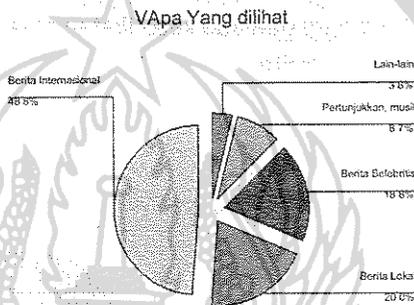


Dari tingkatan usia dan penggunaan media massa, terlihat usia responden rata-rata 26-36 tahun (36,3%). Dengan demikian responden memiliki kematangan berpikir dan dapat menilai secara obyektif. Dari penggunaan media massa terlihat, bahwa responden kerap mencari berita melalui televisi (35%), sehingga terpaan pemberitaan terorisme bukan sesuatu yang baru.

e. Frekuensi



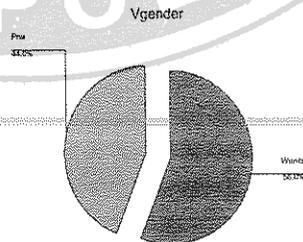
f. Konsumsi Media Massa



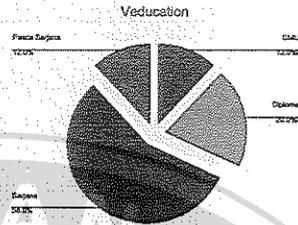
Dari unsur frekuensi berita dan berita yang paling sering dikonsumsi, terlihat, bahwa responden adalah pihak yang kerap melihat dan mencari berita setiap saat (55%), sedangkan responden sering mengonsumsi berita Internasional (48,8%). Dengan demikian responden adalah pihak-pihak selektif mencari berita dan memahami berita internasional.

Variabel X

a. Gender

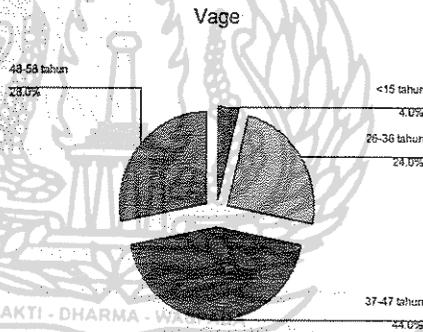


b. Pendidikan

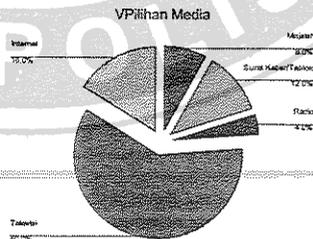


Dari gender dan pendidikan untuk staf dan anggota Polri Mabes Polri, di Divisi Humas, responden terbanyak wanita (56%) dengan pendidikan sarjana (56%). Dengan demikian jawaban mereka dipastikan memiliki kadar intelektualitas tinggi dan ada keterikatan rasa dan emosi di dalamnya, karena banyak diisi oleh wanita.

c. Usia

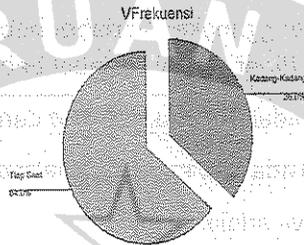


d. Pilihan Media Massa

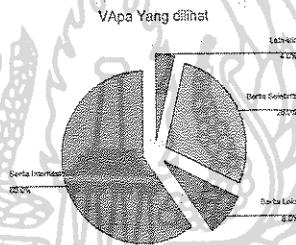


Dari usia dan pilihan media massa, terlihat usia yang mendominasi responden berusia 37-47 tahun (44%). Dapat diketahui usia sedemikian masuk masa kerja lama dan berpengalaman. Pilihan media massa juga adalah televisi (60%), dengan demikian responden adalah mereka yang mengikuti perkembangan berita.

e. Frekuensi

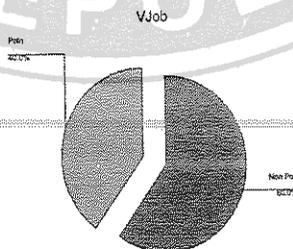


f. Konsumsi Media Massa



Dari frekuensi melihat berita, responden mengaku setiap saat melihat dan mencari berita (64%). Dengan demikian responden adalah pihak yang memantau pemberitaan di media massa. Kebanyakan responden menyukai berita internasional (60%). Dengan demikian responden adalah pihak yang mengikuti perkembangan pemberitaan tentang teroris.

g. Komposisi Anggota Polri dan Staf PNS



Responden dalam penelitian ini didominasi PNS dan Pegawai Harian Lepas (60%). Dengan demikian dapat disebutkan bahwa representasi tentang anggota Polri tidak dapat diwakili secara penuh dalam penelitian ini.

G. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan variabel bebas (yang mempengaruhi) dan variabel terikat (yang dipengaruhi variabel bebas).

- a. Variabel bebas (X) adalah Pendapat Staf dan Anggota Divisi Humas Polri
- b. Variabel terikat (Y) adalah Pendapat Khalayak Jakarta dan Jawa Barat

Hipotesis kerjanya adalah :

- a) Ho : Tidak terdapat hubungan antara X dan Y terhadap pemahaman isu-isu agenda setting
- b) Ha: Terdapat hubungan X dan Y terhadap pemahaman isu-isu agenda setting

Hasil yang didapat dari pengujian hipotesis adalah:

Correlations

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|
| BARU | Pearson Correlation | 1 | .550* |
| | Sig. (1-tailed) | . | .011 |
| | N | 80 | 17 |
| BARU1 | Pearson Correlation | .550* | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | .011 | . |
| | N | 17 | 17 |

Nilai regresi (*pearson correlations*) sebesar 0,550 dengan nilai *p* value sebesar 0,011. Nilai ini berada di bawah 0,05 (*one tailed*), diketahui H0 Ditolak, sedangkan Ha Diterima. Pengujian hipotesis berada pada nilai Ha. Dengan demikian, terdapat hubungan/kesamaan/kesesuaian yang erat antara pandangan khalayak tentang teroris dengan Divisi Humas Mabes Polri. Kesesuaian ini menunjukkan adanya keberhasilan menciptakan agenda

tentang suatu pemberitaan yang sama antara Polri dengan masyarakat. Divisi Humas Mabes Polri telah berhasil menciptakan kesamaan berpikir dengan khalayak melalui pemberitaan terorisme.

Sedangkan dalam pengukuran Spearman rho diketahui sebagai berikut:

Correlations

| | | | | |
|----------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Spearman's rho | BARU | Correlation Coefficient | 1.000 | .626** |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .007 |
| | | N | 80 | 17 |
| | BARU1 | Correlation Coefficient | .626** | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .007 | |
| | | N | 17 | 17 |

Nilai spearman sebesar 0,626 dengan nilai value sebesar 0,007 nilai ini berada di bawah 0,05. Dengan demikian diketahui H_0 ditolak, sedangkan H_a diterima. Hipotesis berada di wilayah penerimaan H_a . Hasilnya sama dengan pengujian *Pearson Correlations*. Ada kesamaan dan kesesuaian pendapat antara khalayak dengan divisi Humas Mabes Polri terhadap pemberitaan teroris.

H. Temuan dan Kesimpulan

Temuan menyebutkan bahwa Divisi Humas Mabes Polri sudah berhasil menjalankan tugas dengan baik menciptakan gambaran teroris di mata masyarakat melalui pemberitaan sesuai diinginkan. Kesamaan ini terukur dengan uji hipotesis yang menunjukkan adanya kesesuaian jawaban antara khalayak dengan staf Divisi Humas Mabes Polri tentang teroris. Masyarakat mengakui, bahwa teroris perlu dihukum berat dan membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan dan penciptaan Kamtibmas diserahkan sepenuhnya kepada Polri, khusus untuk kasus teroris. Keberhasilan menangkap dan menumpas teroris adalah yang diharapkan khalayak. Dengan demikian agenda setting antara divisi Humas Polri dan khalayak sudah sangat tinggi, dan ini seharusnya diikuti pada penciptaan agenda setting pemberitaan yang lain dari Humas Mabes Polri, seperti; korupsi, illegal logging dan pelayanan.